

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KARYABARU
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

Anggun Ria Andera
NPP. 30.0329

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Kebijakan Publik
Email: anggunandera@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Cash Social Assistance (BST) is a government program policy to encourage socio-economic progress and prosper the Indonesian people, including Karyabaru Village, Alang-Alang Lebar District, Palembang City, South Sumatra. **Purpose:** This study aims to find out how the policy implementation of the Cash Social Assistance (BST) program in improving people's welfare in the Karyabaru Village, the inhibiting factors for the Implementation of the Social Assistance Program (BST) Policy in Improving Community Welfare, and efforts to overcome the inhibiting factors for the implementation of Social Assistance program policies Cash (BST) in improving people's welfare. **Method:** Qualitative analysis methods are used for studies that use text data, perceptions, and other written materials to find out things that are not measurable with certainty. **Result/Findings:** The results of the study show that the implementation of the cash social assistance program (BST) policy in general has been going well but not fully optimal in accordance with the established policies. **Conclusion:** The inhibiting factors for the implementation of the Social Cash Assistance (BST) program policy in improving people's welfare in the Karyabaru Village are: data updating is not carried out so that recipient data is not accurate with what is in the field, implementing regulations that have not been implemented in accordance with established provisions, evaluations not routinely carried out. Efforts are being made, namely updating and updating information on BST recipient data and reporting to the information and data center, the active role of relevant actors and the community in providing and seeking regarding terms and procedures to be able to receive cash social assistance programs, evaluations that must be carried out routinely.

Keywords: policy implementation, cash social assistance, community welfare

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan kebijakan program pemerintah untuk mendorong kemajuan sosial ekonomi serta mensejahterakan masyarakat Indonesia termasuk Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan. **Tujuan:** Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karyabaru, faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Metode:** analisis kualitatif digunakan untuk kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti. **Hasil/Temuan:** Hasil Penulisan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bantuan sosial tunai (BST) secara umum pelaksanaannya telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. **Kesimpulan:** Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karyabaru yaitu: tidak dilakukannya pengupdatean data sehingga data penerima tidak akurat dengan yang ada dilapangan, ketetapan aturan pelaksanaan yang belum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, evaluasi yang tidak rutin dilaksanakan. Upaya yang dilakukan yakni melakukan pengupdatean dan pemutakhiran informasi data penerima BST dan pelaporan ke pusat informasi dan data, peran aktif aktor terkait dan masyarakat dalam memberi dan mencari mengenai syarat dan prosedur untuk dapat menerima program bantuan sosial tunai, pelaksanaan evaluasi yang harus rutin dilaksanakan.

Kata kunci: Impelementasi kebijakan, bantuan sosial tunai, kesejahteraan masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu dunia yang membawa pengaruh besar bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia adalah isu yang menjadi prioritas pemerintah yang hingga kini belum dapat teratasi. Berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan terus dicanangkan seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam hal ini dinyatakan bahwa “untuk melakukan percepatan penanggulangan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi efektifitas anggaran, perlu dilakukan pengutan kelembangaan nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan”.

Berangkat mengenai sistem jaminan sosial bagi masyarakat, Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menetapkan APBN tahun anggaran 2022. Perpres ini menyebutkan bahwa Bantuan sosial tunai Desa (BST Desa) harus dianggarkan sekurang-kurangnya 40% dari pagu dana desa, yaitu jumlah uang yang dapat dikumpulkan desa dari warganya. Presiden membuat peraturan Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut guna memaksimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat akan bantuan yang

diprogramkan oleh pemerintah, program tersebut diharapkan dapat membuat ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat meningkat dari sebelum mereka mendapatkan bantuan tersebut.

Pelaksanaan Program mengenai bantuan atau jaminan sosial pun di sambut baik oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dimana pemerintah Kota Palembang membuat Kebijakan melalui Peraturan Walikota Palembang No.14 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pemerintah kota Palembang membuat peraturan tersebut dengan harapan program yang dibuat dapat tepat sasaran serta terhindar dari penyalagunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan ini membuat kecilnya kemungkinan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan yang bukan haknya, kemudian antara pemerintah dan masyarakat harus tertib administrasi seperti pelaporan dan pertanggung jawaban atas dana yang diberikan oleh pemerintah serta diterima oleh masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dibuat pemerintah bertujuan untuk menaikkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dengan harapan terjadinya penurunan jumlah masyarakat kurang mampu yang signifikan. Masyarakat miskin seharusnya mencari informasi agar memenuhi kategori penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Angka penerima Bantuan sosial tunai (BST) yang tidak maksimal sangat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya merasakan program dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi serta menjadi lebih sejahtera dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Karyabaru dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap penduduk miskin di Kelurahan Karyabaru seperti data penerima bantuan yang tidak diupdate untuk kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kadalauarsanya data yang digunakan dalam pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada KPM sering terjadi dan membuat masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) dirugikan. Hal ini sejalan dengan data BPS di Kelurahan Karyabaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dikelurahan Karyabaru pada tahun 2020 terdapat sebanyak 629 dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Karyabaru pada tahun 2020 sebanyak 352 orang. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 1353 dan yang mendapat bantuan hanya sebanyak 645 jiwa. Pada tahun 2022 Jumlah penduduk meningkat hingga 1820 jiwa, namun yang menerima program bantuan sosial tunai justru menurun yang semula 645 menjadi 340. Padahal, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan mengapa program bantuan sosial kepada masyarakat berkurang padahal jumlah penduduk miskin justru meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan program bantuan sosial maupun konteks kemiskinan. Penelitian Arwanto dan Wira berjudul Implementasi Peraturan Kepala Desa tentang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa Akibat Pandemi di Kabupaten Garut (Arwanto & Wira, 2021), menemukan bahwa program Bantuan sosial tunai Dana Desa (BSTDD) yang dilaksanakan di Desa Kereseck berjalan dengan baik berdasarkan teori komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Edward III. Tidak ada pengaduan yang dilaporkan dari proses pendataan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Pada penelitian Zakiyah yang berjudul Perempuan dan kemiskinan (studi kasus kehidupan perempuan sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) menemukan bahwa kehidupan perempuan sebagai buruh bangunan di Desa Tropodo sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, sehingga mereka menjadi buruh bangunan. Ini karena keluarga dan tradisi atau kebiasaan mereka biasanya memaksa mereka untuk bekerja di bidang ini, dan seringkali mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang membatasi pilihan mereka (Zakiyah, 2013). Penelitian Iqbal (2013) dengan judul Implementasi program Bantuan sosial tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Iqbal menemukan bahwa Implementasi Program sudah berjalan cukup baik dengan melakukan sosialisasi terhadap program bantuan sosial tunai. Data RTS yang terverifikasi masih memiliki banyak ketidaksesuain.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang diangkat berfokus pada implementasi kebijakan program bantuan sosial tunai. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S, Grindle yang memiliki beberapa dimensi yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan. Serta data yang digunakan pada penelitian ini merupakan terbaru dari penelitian terdahulu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada implementasi program bantuan sosial. Dijelaskan pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis terhadap tujuan penelitian agar terdapatnya suatu hasil dimana peneliti menjadi perangkat kunci dalam penelitian, selanjutnya hasil tersebut dijelaskan dengan kalimat tertulis pada data empiris yang telah

didapat dan pendekatan juga menyudutkan makna daripada generalisasi. Dengan penjelasan diatas peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan, sebab penelitian ini sangat memungkinkan untuk peneliti mengkaji pada fokus persoalan yang akan penulis melakukan penelitian secara mendalam dan mengkaji lebih luas. Kegiatan Penulisan tidak lepas dari data yang merupakan bahan mentah untuk mendeskripsikan topik penulisan. Penulis menggunakan dua sumber data yang akan diolah dalam penulisan ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer penulis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 338) adalah hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder, merupakan data yang langsung diperoleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Bisa juga dikatakan data yang tersistematis dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada sumber data sekunder ini, peneliti memperoleh data dari internet dan jurnal. Sedangkan teknik analisis data berupa pengumpulan data mentah, transkrip data, koding, kategori data, penyimpulan sementara; dan penyimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Karyabaru berpedoman pada teori Grindle, 2017 (dalam Subarsono 2011: 93) tentang Implementasi Kebijakan yang terdiri atas dua dimensi meliputi Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan. Maka ke dua dimensi tersebut akan menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar, sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

Penyaluran dana sosial tunai ini membawa dampak dan manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan Sosial Tunai membawa perubahan yang lebih maju sesuai dengan harapannya yakni untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) masih mengalami kendala, dimana penyaluran dana bantuan menjadi kurang tepat sasaran karena data yang tidak akurat disebabkan data tidak mengalami pembaharuan. pelaksanaan kebijakan mengenai program bantuan sosial tunai belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

2. Lingkungan Kebijakan

Kurangnya komunikasi antar aktor pemangku kebijakan serta kurangnya peran aktif dari pihak terkait kepada masyarakat untuk menjembatangani masyarakat agar memperoleh pengetahuan untuk dapat menjadi bagian penerima bantuan dengan memenuhi syarat yang berlaku.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Berdasarkan temuan di lapangan diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan (BST) di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar antara lain:

1. Ketidakakuratan Data

Masalah pertama adalah informasi tentang penerima manfaat tidak benar. Misinformasi selalu menjadi masalah klasik dalam setiap penyaluran bantuan sosial, termasuk dalam hal ini Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan di Kelurahan Karyabaru. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, tidak semua data Kementerian Sosial (DTKS) dikaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Proses pembuktian dan verifikasi masih lemah dan lamban. Hal ini menyebabkan munculnya orang-orang rentan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam basis data program penerima manfaat. Orang-orang dalam kelompok ini akhirnya tidak menerima program tersebut.

2. Ketetapan Aturan Pelaksanaan

Kepatuhan terhadap aturan bansos seringkali menjadi kendala karena proses pencairan bansos masih menggunakan dokumen yang sudah kadaluarsa. Sehingga kurang menyoar penerima manfaat akibat perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang ada. Aturan pelaksanaan harusnya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan kebijakan yang ada. Karena hal ini berpengaruh terhadap layanan dan kepercayaan publik. Bila mana aturan yang tetapkan justru tidak dijalankan dengan seharusnya maka akan sulit untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

3. Evaluasi Pelaksanan Program

Kurangnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses penyaluran dana bantuan sosial terkendala. Menurut penuturan dari informan mengenai penggunaan data lama harusnya pihak terkait melaporkan dan mengkonfirmasi hal tersebut. Untuk itu, evaluasi dalam hal ini harusnya rutin dilaksanakan agar menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program kedepan.

3.3 Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Pada Implementasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan

Dalam penulisan ini, penulis merekomendasikan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyaluran program bantuan sosial tunai di Kelurahan Karyabaru, meliputi:

1. Update Data dan Pelaporan

Dalam hal ini, sebagai upaya peningkatan pemanfaatan program bansos tunai, Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar melakukan pemutakhiran data dan pelaporan ke Pusat Informasi.

2. Peran Aktif

Sebagai salah satu upaya agar warga Kelurahan Karyabaru dapat menjadi bagian dari penerima bantuan sosial tunai, pemerintah daerah setempat harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai prosedur serta syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial. Selain itu, perlu juga keaktifan dari masyarakat dalam mencari informasi terkait bantuan sosial serta memiliki kesadaran dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

3. Evaluasi

Sebagai bagian dari upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat pihak instansi terkait harus terus melakukan evaluasi secara rutin untuk mengecek apakah dana bantuan sudah tepat sasaran serta apakah pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik. Apabila hal ini terus dilakukan maka akan ada gambaran bagi pemerintah untuk mengambil langkah terhadap pelaksanaan kebijakan program bantuan sosial tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan program bantuan sosial tunai di Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun hambatannya antara lain: data yang dipergunakan dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tunai merupakan data yang lama, aturan yang kurang tegas serta evaluasi yang minim. Dilihat dari temuan terdahulu terdapat kesamaan pada penelitian sekarang dimana keterhambatan implementasi kebijakan program bantuan sosial tunai (BST) di sebabkan karena data RTS yang terverifikasi masih memiliki banyak ketidaksesuaian. Sedangkan pada perbedaan yang ditemukan pada penelitian terdahulu penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan teori Grindlee.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan teori Marylee S. Grindle maka dapat ditarik kesimpulan UU Bantuan Sosial Tunai (BST) belum secara optimal diadopsi, dimana pada data penerima bantuan masih banyak mengalami kendala dimana data-data penerima bantuan merupakan data lama. Sehingga hal ini menyebabkan penerima bantuan sosial tunai kurang tepat sasaran karena perubahan ekonomi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Berdasarkan analisis data faktor-faktor penghambat pelaksanaan program BST di kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: Data penerima BST harus selalu di Update dan dilakukan pemuktahiran data agar tidak terjadi kesalahan dalam penerima bantuan. Selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak-pihak

terkait sehingga tidak ada halangan dalam pelaksanaan penyalurannya. Terakhir terus melakukan pemantauan dilapangan agar proses penyaluran dapat tepat sasaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja yakni Kelurahan Karyabaru sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Grindlee.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program bantuan sosial tunai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Cut Laila Karmila, Lurah Karyabaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ginting, Arwanto Harimas dan Bintang, Wira Abdillah.2021. “Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut” Jurnal. Jatinangor

Iqbal.2013.” Implementasi program Bantuan sosial tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus” Jurnal. Kudus

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Palembang No.14 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Sugiyono. 2017. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Zakiyah.2013. “Perempuan dan kemiskinan (studi kasus kehidupan perempuan sebagai Buruh Bangunan di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” Jurnal. Sidoarjo